



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga Negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sector pajak karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sector pajak.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan system perpanjangan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri di wilayahnya. Sistem otonomi daerah diharapkan mampu membangun Negara secara lebih efisien karena implementasi pembangunan dilaksanakan di daerah secara langsung. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mencari sumber pendapatan, sehingga diperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat di paksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbale ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan Perubahan Atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dan kini pajak terbagi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak daerah. Pajak provinsi yaitu ada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Dan Pajak Daerah telah diperbaharui dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan Undang – Undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dan pajak daerah terbagi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah diantaranya : Pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan oleh hotel itu sendiri. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pariwisata, wisma, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Objek pajak hotel (Pasal 4) adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai ikelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek pajak (Pasal 5) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusaha hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Dasar pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten / kota yang mengatur tentang Pajak Hotel pada kabupaten / kota dimaksud. Dasar pengenaannya hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi yaitu 10% (Pasal 7) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Besaran pokok Pajak Hotel (Pasal 8) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Pajak Hotel didasarkan pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Adapun daftar jumlah wajib pajak Kabupaten Pelalawan yang membayar maupun yang tidak membayar Pajak Hotel, sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**

**Daftar dan Wajib Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Jumlah wajib pajak	Jumlah wajib pajak yang bayar	Jumlah wajib pajak yang tidak bayar
1	2012	12	8	4
2	2013	12	9	3
3	2014	14	11	3
4	2015	16	15	1
5	2016	16	16	-

Sumber: *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan*

Berdasarkan dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan dalam lima tahun terakhir dimana dari tahun 2012 jumlah wajib pajak seluruhnya 12, yang membayar yaitu sebanyak 8 orang dan tidak bayar pajak sebanyak 4 orang dan pada tahun 2013 jumlah wajib pajak seluruhnya 12, yang membayar yaitu sebanyak 9 orang dan tidak bayar pajak sebanyak 3 orang dan pada tahun 2014 jumlah wajib pajak seluruhnya 14, yang membayar yaitu sebanyak 11



orang dan tidak bayar pajak sebanyak 3 orang dan pada tahun 2015 jumlah wajib pajak seluruhnya 16, yang membayar yaitu sebanyak 15 orang dan tidak bayar pajak sebanyak 1 orang tahun 2016 jumlah wajib pajak seluruhnya 16, yang membayar yaitu sebanyak 15 orang dan tidak bayar pajak sebanyak 1 orang. Dengan demikian penerimaan atau pendapatan dari sector pajak hotel pada lima tahun berturut-turut belum signifikan oleh wajib pajak maupun dari kantor itu sendiri.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Dinas Kubapten Pelalawan mulai Tahun 2013-2015 seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2015**

NO	TAHUN	JUMLAH HOTEL	TARGET	REALISASI	%
1	2012	12	800.000.000,00	760.000.000,00	95
2	2013	12	900.000.000,00	850.000.000,00	94
3	2014	14	1.200.000.000,00	982.000.000,00	81
4	2015	16	1.275.000.000,00	1.280.540.000,00	104
5	2016	16	1.480.000.000,00	1.702.713.416,00	115

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa target dan realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2012-2016 masih belum efektif. Dimulai pada tahun 2012 penerimaannya mencapai sebesar 95%, dan pada tahun 2013 mencapai sebesar 94%, dan pada tahun 2014 mencapai sebesar 81%, tetapi pada tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan yang penerimaan pajak hotelnya mencapai target seperti tahun 2015 104% mencapai sebesar , dan tahun 2016 mencapai sebesar 115% .

Pada daerah Kabupaten Pelalawan terdapat banyak jenis pajak daerah yaitu salah satunya Pajak Hotel yang pajak tersebut akan dipungut pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan dan permasalahannya adalah Wajib Pajak Pajak Hotel belum memahami sepenuhnya bagaimana cara pemungutan dan pengenaan yang benar dan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil dan mengkaji judul **“Tata Cara Pemungutan dan Pengenaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Perumusan Masalah

Agar penulisan tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka pembahasan dilakukan dengan batasan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pemungutan dan pengenaan pajak hotel di Dispenda Kabupaten Pelalawan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan dan pengenaan pajak hotel di Dispenda Kabupaten Pelalawan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini dapat penulis jelaskan seperti :

1. Untuk mengetahui tata cara pemungutan dan pengenaan pajak hotel di Dispenda Kabupaten Pelalawan
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam pemungutan dan pengenaan pajak hotel di Dispenda Kabupaten Pelalawan

### 1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang didapat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penulis mendapat wawasan ilmu di bidang perpajakan khususnya tentang tata cara pemungutan dan pengenaan pajak hotel.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai bahan referensi agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan sehingga dapat berguna bagi penelitian berikutnya.

## **1.4 Metode Penulisan**

### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan dilakukan di Kantor Dispenda Kabupaten Pelalawan Jl. Sultan Syarif Hasyim No. 1, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau.

### **1.4.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2017 sampai dengan selesai.

### **1.4.3 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan saat penelitian adalah Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara. Yang mana dalam hal ini penulis telah mewawancarai secara langsung kepada pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan(laporan penerimaan dan pengeluaran Dispenda Kabupaten Pelalawan), catatan, dan dokumen(data-data kantor



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun arsip-arsip penting Dispenda) melalui Kantor Dispenda Kabbupaten Pelalawan.

#### **1.4.4 Metode Pengumpulan Data**

Penulisan ini mengumpulkan data dengan teknik Interview dan Dokumen.

- a. Observasi adalah penulisan mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara (Interview) yaitu mengajukan pertanyaan- pertanyaan secara lisan langsung dengan sumber datanya terhadap pihak Kantor Dispenda Kabupaten Pelalawan yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diberikan bagi penyusun penelitian ini.
- c. Dokumentasi yaitu pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik yang ada di instansi tersebut, yang mana data- data tersebut didapatkan dari dokumen- dokumen atau arsip – arsip yang ada di Kantor Dispenda Kabupaten Pelalawan.

#### **1.5 Analisa Data**

Analisa data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk masalah yang di akan diteliti. Dan yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisa data kualitatif.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika pembahasan Tugas Akhir ini diupayakan agar dapat mewujudkan suatu pemikiran yang lebih jelas mengenai gambaran masalah yang hendak disampaikan. Adapun sistematika pembahasan Tugas Akhir ini adalah :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam penelitian ini.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Bab ini menguraikan gambaran umum Kantor Dispenda Kabupaten Pelalawan, tentang sejarah berdirinya lokasi penelitian, visi dan misi kantor tersebut, dasar hukum, struktur organisasi unit kerja dan tugas yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pelalawan.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang Tata Cara dan Pengenaan Pajak Hotel di BPKAD Kabupaten Pelalawan.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal – hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam Tata Cara Pemungutan dan Pengenaan Pajak Hotel.

## **DAFTAR PUSTAKA**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.